

Pelatihan Vokasi Bagi Narapidana Reintegrasi oleh Pokmaslipas di Bapas Purwokerto

Lalu Harjan Islamianto^{1*}, Ihsanudin², Kholil Lur Rochman³

¹⁻³ UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Email: 224110101072@mhs.uinsaizu.ac.id^{1*}, 224110101063@mhs.uinsaizu.ac.id²,
cholil@uinsaizu.ac.id³

Korespodensi email: 224110101072@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract. *This study aims to explore the role of Community Groups Caring for Corrections (Pokmas Lipas) in empowering former employees at Bapas Purwokerto. Former employees face complex challenges during reintegration into society, including negative stigma, limited skills, and access to resources. Through a qualitative approach, this study identified various programs run by Pokmas, such as skills, moral support training, and provision of facilities to help former employees re-adapt. The results of the study indicate that Pokmas Lipas plays an important role in reducing community stigma, building self-confidence, and creating a more inclusive environment. With the right support, former participants can function productively and responsibly in society, thereby reducing the risk of recidivism. This study is expected to provide insights and strategic steps to improve the effectiveness of previous empowerment programs in the future.*

Keywords: *Empowerment, Social Reintegration, Negative Stigma*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) dalam memberdayakan mantan narapidana di Bapas Purwokerto. Mantan narapidana menghadapi tantangan yang kompleks selama reintegrasi ke masyarakat, termasuk stigma negatif, keterbatasan keterampilan, dan akses ke sumber daya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi berbagai program yang dijalankan oleh Pokmas, seperti keterampilan, pelatihan dukungan moral, dan penyediaan fasilitas untuk membantu mantan pegawai beradaptasi kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokmas Lipas berperan penting dalam mengurangi stigma masyarakat, membangun kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan dukungan yang tepat, mantan narapidana dapat berfungsi secara produktif dan bertanggung jawab di masyarakat, sehingga mengurangi risiko residivisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan sebelumnya di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Reintegrasi Sosial, Stigma Negatif

1. PENDAHULUAN

Mantan narapidana sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks ketika kembali ke masyarakat. Proses reintegrasi sosial pascapenjara tidak hanya melibatkan penerimaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan kemampuan individu untuk membangun kembali kepercayaan diri, kemandirian ekonomi, dan hubungan sosial yang sehat. Sayangnya, stigma negatif terhadap mantan kompensasi sering kali menjadi penghalang utama bagi keberhasilan proses ini, yang berpotensi memicu residivisme atau pelanggaran tindak pidana. Oleh karena itu, integrasi kembali sosial dan rehabilitasi pascapenjara menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberdayaan menjadi salah satu solusi yang penting untuk membantu mantan kinerja kembali berfungsi secara produktif di masyarakat. Pemberdayaan

tidak hanya mencakup pengembangan keterampilan kerja, tetapi juga penguatan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tekanan sosial. Segala bentuk aturan yang diterapkan dalam Balai Pemasyarakatan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pelatihan yang dijalankan untuk bertujuan membantu mereka mempersiapkan diri agar, setelah bebas, mampu kembali, menjadi masyarakat warga negara yang baik, berkontribusi dalam pembangunan, dan menghindari pengulangan tindak pidana. Selain mencegah melakukan kejahatan kembali, pelatihan ini juga diharapkan mendukung proses pengembangan diri mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih berkualitas.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah suatu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas untuk memberikan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Baik tugas maupun fungsinya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjalankan peran dalam pelaksanaan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terkait penyelenggaraan pembinaan terhadap klien yang berada di wilayah kerja masing-masing, termasuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pendampingan agar proses reintegrasi sosial berjalan efektif. (Penelitian & Pemasyarakatan, 2019) Jenis pembimbingan yang wajib diberikan oleh Bapas meliputi pembinaan dalam aspek kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan tersebut dirancang agar mampu membantu klien pemasyarakatan untuk dapat kembali diterima di tengah masyarakat dan menjalani kehidupan secara normal, dengan keterampilan yang diperoleh selama proses pembimbingan. Dengan demikian, diharapkan klien pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan (Muhammad, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 9, yang dimaksud dengan "Klien Pemasyarakatan" adalah individu yang berada di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Lebih rinci, dalam Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa klien pemasyarakatan mencakup beberapa kategori, yaitu:

- a. Narapidana dengan syarat.
- b. Terpidana, Anak Pidana, dan Anak.Negara memperoleh kebebasan dengan syarat ataupun cuti menjelang kebebasannya.
- c. Anak Negara.berdasar kepada keputusan pengadilanm binaannya di serahkan pada orangtuanya ataupun badan sosial.
- d. Anak Negara berdasar kepada putusan Menteri dilingkungan Direktorat yang ditentukan, pembimbingan diserahkan untuk orangtua asuhnya ataupun badan sosial. dan

e. Anak yang berdasar kepada menetapkan pengadilannya.

Klien pemasyarakatan ini menjadi subjek utama dalam proses pembimbingan sosial dan kemandirian oleh Bapas, dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab. bimbingan kembali untuk. orangtua ataupun wali nya. Pada sistem peradilan pidana, reintegrasi fokusnya kepada proses masuk ke masyarakat oleh individu yang pernah dilembaga kemasyarakatan.

Mengintegrasikan kembali penyesuaian ke dalam kehidupan di masyarakat bukanlah tugas yang mudah, karena mereka perlu memahami dirinya sendiri serta cara beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial. Narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sering menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kepribadian, yang dapat menjadi tantangan bagi mereka setelah kebebasan. Banyak kebingungan mengatasi keterbatasan keterampilan yang menghambat kemampuan mereka untuk bersaing dan sukses di masyarakat. Keterampilan interpersonal yang lemah, tingkat pendidikan formal yang rendah, kurangnya kemampuan membaca dan menulis, serta minimnya keterampilan perencanaan dan manajemen keuangan adalah beberapa kendala yang sering dihadapi. (SITA AIZA NUR AIDA, 2024) Masa transisi dari pelestarian ke kehidupan masyarakat menjadi tantangan besar bagi pemenuhan dan juga menambah tekanan dalam proses pengawasan mereka di lingkungan sosial. Selain itu, masa terpencil sering kali membawa dampak signifikan, seperti hilangnya pekerjaan, aset pribadi, kemampuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi diri sendiri dan keluarga, serta hubungan pribadi yang penting. Penahanan juga dapat merusak jaringan sosial mereka, memicu gangguan kesehatan mental, atau membentuk kebiasaan dan sikap yang merugikan diri sendiri.

Reintegrasi sosial hadir sebagai wujud kepedulian terhadap keamanan masyarakat sekaligus mendukung kompensasi untuk kembali beradaptasi dan berinteraksi di tengah masyarakat. Tujuannya adalah membantu mereka membangun kembali hubungan sosial, kehidupan pribadi, serta kemampuan bekerja, menyesuaikan peran mereka sebagai manusia, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan. Keberhasilan dalam meredam klien pemasyarakatan selama proses reintegrasi dan mencegah terjadinya tindak kejahatan memerlukan pendekatan yang beragam. Program reintegrasi bertujuan mendukung perdamaian untuk kembali berbaur dalam masyarakat, memulihkan solidaritas dalam hubungan sosial, kehidupan pribadi, dan peran mereka sebagai manusia, makhluk sosial, serta ciptaan Tuhan. Sebagai sebuah upaya terencana, keberhasilan program reintegrasi sosial ini sangat

bergantung pada optimalisasi setiap komponen yang terlibat.(Fauzi & Pemasarakatan, 2021)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-06.OT.02.02.Tahun 2020 tentang Pokmas Lipas, Balai Pemasarakatan (Bapas) diinstruksikan untuk membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) sebagai langkah strategis dan inovatif dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas. Inisiatif ini mencerminkan bentuk nyata kepedulian Direktorat Jenderal Pemasarakatan (DitjenPas) terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan klien pemasarakatan. Salah satu contoh implementasi nyata dari kebijakan ini adalah Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Purwokerto, yang telah berhasil membentuk Pokmas Lipas sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Melalui Pokmas Lipas, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam mendukung reintegrasi sosial para klien pemasarakatan agar dapat kembali hidup secara produktif di tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Bapas Kelas II Purwokerto telah menjalin strategi kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, kelompok masyarakat, dan individu yang memiliki kepedulian terhadap proses reintegrasi sosial. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung upaya pelatihan klien pemasarakatan, membantu mereka kembali beradaptasi di masyarakat, dan mencegah potensi tindak kejahatan. Langkah ini mencerminkan komitmen Bapas Kelas II Purwokerto dalam menjalankannya secara optimal untuk menciptakan kehidupan

Berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul kerap menjadi faktor menurunnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasarakatan. Sasaran utama dari sistem ini adalah menjadikan warga binaan sebagai individu yang menyadari kesalahannya, mampu melakukan perbaikan diri, dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Di samping itu, mereka juga diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat, ikut serta dalam kegiatan pembangunan, serta menjalani kehidupan yang normal dan penuh tanggung jawab.

Namun, pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasarakatan belum sepenuhnya optimal. Hal ini diperburuk oleh kurangnya wawasan dan pemahaman normatif dalam terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas). Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat demi mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial dan pembinaan warga binaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memandang pentingnya dilakukan sebuah penelitian yang berfokus pada Pemberdayaan Mantan Narapidana melalui Peran Pokmas Lipas di Bapas Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) yang berada dibawah naungan Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto dalam memberdayakan mantan narapidana. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, mendukung reintegrasi sosial, dan membantu mantan narapidana agar dapat beradaptasi kembali dalam masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab.

2. METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, menurut (Moha, 2019) kualitatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada pengamatan secara mendalam terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara rinci melalui kegiatan wawancara, observasi, serta pengumpulan data langsung di lapangan. Seluruh proses tersebut disusun untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai metode penelitian yang digunakan, mencakup pihak-pihak yang terlibat, lokasi pelaksanaan, sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, serta proses analisis data yang diterapkan. Penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tersurat maupun tersirat, berdasarkan hasil pengamatan terhadap subjek dan objek penelitian.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh temuan-temuan baru yang tidak bisa dijelaskan semata-mata melalui data statistik (Bado, 2022). Berdasarkan pendapat Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami guna memahami serta menginterpretasikan fenomena yang berlangsung. Proses ini mencakup metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis terhadap dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pokmas lipas di Bapas Purwokerto

Pemasarakatan merupakan sistem pembinaan yang dirancang untuk membimbing narapidana agar mampu kembali ke masyarakat dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan komunitasnya, serta tidak mengulangi tindak pidana. Sistem ini menempatkan masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam proses reintegrasi sosial.

Namun, proses ini menghadapi kendala besar berupa stigma negatif terhadap mantan narapidana yang sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kelompok Masyarakat (Pokmas) hadir sebagai wadah masyarakat peduli pemasyarakatan. Pokmas tidak hanya membantu mendukung pembinaan dan bimbingan bagi narapidana, tetapi juga berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih menerima keberadaan mantan narapidana di lingkungan mereka.

Pokmas dirancang untuk mencapai tiga tujuan utama yaitu memberikan keterampilan dan bimbingan kemandirian kepada narapidana dan mantan narapidana, sehingga mereka dapat hidup produktif. mengedukasi masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. mengurangi hambatan reintegrasi sosial yang dihadapi mantan narapidana. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, berbagai kegiatan telah dikembangkan oleh Pokmas, di antaranya: Pelatihan Keterampilan Pelatihan ini disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh Bapas. Keterampilan yang diajarkan meliputi bidang usaha seperti berdagang, menjahit, dan membuat kue. Program ini dirancang agar para mantan narapidana memiliki bekal konkret untuk bekerja atau membuka usaha mandiri. Edukasi Kepribadian Bimbingan kepribadian diberikan untuk memperkuat mental, iman, dan rasa tanggung jawab para klien pemasyarakatan. Hal ini penting untuk membangun kembali rasa percaya diri dan memperbaiki hubungan sosial mereka. Penyediaan Kesempatan Kerja Melalui kerja sama dengan berbagai sektor, Pokmas membuka peluang kerja bagi mantan narapidana. Kesempatan ini mencakup pekerjaan di bidang dagang, konveksi, dan kuliner, sehingga mereka dapat berkontribusi secara nyata dalam masyarakat.

Salah satu inovasi penting dalam mendukung program Pokmas adalah Griya Abhipraya, sebuah rumah harapan yang dikelola oleh Bapas. Griya ini menjadi tempat bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pelatihan intensif, pendampingan, dan bahkan tempat tinggal sementara. Program Harian Jadwal kegiatan di Griya Abhipraya mencakup pelatihan keterampilan, bimbingan kepribadian, dan edukasi hukum. Dengan rutinitas yang terstruktur, para mantan narapidana didorong untuk mengembangkan kebiasaan produktif dan pola pikir positif. Usaha Produktif Griya Abhipraya juga mengelola berbagai usaha, seperti angkringan dan produksi makanan. Mantan narapidana yang telah menyelesaikan pelatihan dapat bekerja di sini, mendapatkan penghasilan, dan mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka pelajari.

Peran Pokmas Lipas dalam membantu Mantan Narapidana

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) memiliki peran penting dalam mendukung mantan narapidana agar dapat kembali hidup mandiri dan diterima oleh masyarakat. Salah satu peran utama Pokmas Lipas adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada mantan narapidana. Pelatihan ini dirancang berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh pihak lapas atau bapas, sehingga sesuai dengan minat dan bakat masing-masing individu. Misalnya, seorang mantan narapidana yang memiliki minat di bidang kuliner akan diberikan pelatihan membuat kue, atau mereka yang memiliki keterampilan menjahit akan diarahkan untuk memperdalam kemampuannya.

Selain pelatihan, Pokmas Lipas juga membantu menyalurkan mantan narapidana ke dunia kerja. Mereka menjadi penghubung antara mantan narapidana dengan pengusaha atau usaha kecil yang membutuhkan tenaga kerja. Bahkan, beberapa anggota Pokmas yang memiliki usaha sendiri, seperti pembuatan kue, sering kali langsung merekrut mantan narapidana yang sudah dilatih untuk bekerja di tempat mereka. Langkah ini menjadi solusi konkret bagi mantan narapidana yang sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat stigma negatif.

Di sisi lain, Pokmas Lipas juga memberikan dukungan moral kepada mantan narapidana. Mereka mendampingi para mantan narapidana agar tidak merasa minder atau terkucilkan saat berusaha beradaptasi kembali di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Pokmas Lipas juga berperan dalam mengurangi stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, dengan cara mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memberi kesempatan kedua.

Selain itu, Pokmas Lipas turut mendukung program integrasi sosial yang diinisiasi oleh lembaga pemsarakatan. Mereka menyediakan fasilitas seperti Griya Abipaya, sebuah wadah di mana mantan narapidana dapat tinggal sementara waktu, mendapatkan pelatihan tambahan, dan bahkan bekerja hingga mereka merasa siap untuk mandiri. Semua program yang dijalankan oleh Pokmas Lipas bersifat sukarela, didasarkan pada rasa kepedulian terhadap keberhasilan reintegrasi sosial.

Dengan berbagai peran ini, Pokmas Lipas tidak hanya menjadi mitra penting bagi lembaga pemsarakatan, tetapi juga menjadi harapan baru bagi para mantan narapidana yang ingin memperbaiki hidup mereka. Melalui pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan yang mereka lakukan, Pokmas Lipas membantu mantan narapidana menemukan kembali kepercayaan diri, kemampuan, dan juga peluang untuk menjalani hidup sebagai manusia yang lebih baik.

Tantangan yang dihadapi dan manfaat program pemberdayaan

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi mantan narapidana, berbagai kendala dan tantangan muncul dari berbagai sisi, baik itu dari para mantan narapidana itu sendiri, Pokmas Lipas, maupun Balai Pemasarakatan (Bapas). Tantangan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Dari sisi mantan narapidana, stigma sosial menjadi salah satu hambatan terbesar. Mereka sering kali merasa terasing karena pandangan negatif masyarakat terhadap status mereka sebagai mantan pelaku kriminal. Hal ini memengaruhi kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dan membangun kehidupan yang baru. Selain itu, kurangnya keterampilan atau pengalaman kerja turut menjadi hambatan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, sehingga menghadapi kesulitan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Tidak hanya itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti modal usaha, menambah kesulitan mereka dalam memulai kembali hidup yang mandiri.

Di sisi lain, Pokmas Lipas yang menjadi garda depan dalam pemberdayaan juga menghadapi kendala tersendiri. Sebagai kelompok yang bergerak secara sukarela, mereka sering mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran dan kurangnya tenaga manusia yang tersedia. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau dan membantu lebih banyak mantan narapidana. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap program ini sering kali belum optimal. Masih ada stigma di kalangan masyarakat yang enggan berinteraksi atau mendukung upaya reintegrasi mantan narapidana, sehingga Pokmas Lipas harus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah menjaga kesinambungan program. Dengan dukungan yang terbatas, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, keberlanjutan program pemberdayaan menjadi sesuatu yang tidak mudah dicapai.

Sementara itu, Bapas sebagai lembaga resmi yang mendampingi mantan narapidana menghadapi tantangan dari aspek jumlah klien yang harus mereka tangani. Dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang yang berbeda, proses asesmen dan pemantauan membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Selain itu, meskipun Pokmas Lipas menjadi mitra strategis, tidak semua wilayah memiliki kelompok yang aktif atau memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung program-program ini. Kurangnya dukungan dari sektor swasta juga menjadi kendala besar. Masih sedikit perusahaan Dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi mantan narapidana, berbagai kendala dan tantangan muncul dari

berbagai sisi, baik itu dari para mantan narapidana itu sendiri, Pokmas Lipas, maupun Balai Pemasarakatan (Bapas). Tantangan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Dari sisi mantan narapidana, stigma sosial menjadi salah satu hambatan terbesar. Mereka sering kali merasa terasing karena pandangan negatif masyarakat terhadap status mereka sebagai mantan pelaku kriminal. Hal ini memengaruhi kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi dan membangun kehidupan yang baru. Selain itu, keterbatasan keterampilan atau pengalaman kerja juga menjadi tantangan. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, sehingga sulit bersaing dalam mencari pekerjaan. Tidak hanya itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya, seperti modal usaha, menambah kesulitan mereka dalam memulai kembali hidup yang mandiri.

Di sisi lain, Pokmas Lipas yang menjadi garda depan dalam pemberdayaan juga menghadapi kendala tersendiri. Sebagai kelompok berbasis sukarela, mereka kerap berhadapan dengan keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau dan membantu lebih banyak mantan narapidana. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap program ini sering kali belum optimal. Masih ada stigma di kalangan masyarakat yang enggan berinteraksi atau mendukung upaya reintegrasi mantan narapidana, sehingga Pokmas Lipas harus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah menjaga kesinambungan program. Dengan dukungan yang terbatas, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, keberlanjutan program pemberdayaan menjadi sesuatu yang tidak mudah dicapai.

Sementara itu, Bapas sebagai lembaga resmi yang mendampingi mantan narapidana menghadapi tantangan dari aspek jumlah klien yang harus mereka tangani. Dengan beragam kebutuhan dan latar belakang, proses asesmen dan pemantauan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu, meskipun Pokmas Lipas menjadi mitra strategis, tidak semua wilayah memiliki kelompok yang aktif atau memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung program-program ini. Kurangnya dukungan dari sektor swasta juga menjadi kendala besar. Masih sedikit perusahaan

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan bagi mantan narapidana, berbagai kendala dan tantangan muncul dari berbagai sisi, baik itu dari para mantan narapidana itu sendiri, Pokmas Lipas, maupun Balai Pemasarakatan (Bapas). Tantangan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis yang memengaruhi proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Di sisi lain, Pokmas Lipas yang menjadi garda depan dalam pemberdayaan juga menghadapi kendala tersendiri. Sebagai kelompok berbasis sukarela, mereka kerap berhadapan dengan keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau dan membantu lebih banyak mantan narapidana. Selain itu, dukungan masyarakat terhadap program ini sering kali belum optimal. Masih ada stigma di kalangan masyarakat yang enggan berinteraksi atau mendukung upaya reintegrasi mantan narapidana, sehingga Pokmas Lipas harus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah menjaga kesinambungan program. Dengan dukungan yang terbatas, baik dari pemerintah maupun pihak swasta, keberlanjutan program pemberdayaan menjadi sesuatu yang tidak mudah dicapai.

Sementara itu, Bapas sebagai lembaga resmi yang mendampingi mantan narapidana menghadapi tantangan dari aspek jumlah klien yang harus mereka tangani. Dengan beragam kebutuhan dan latar belakang, proses asesmen dan pemantauan memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu, meskipun Pokmas Lipas menjadi mitra strategis, tidak semua wilayah memiliki kelompok yang aktif atau memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung program-program ini. Kurangnya dukungan dari sektor swasta juga menjadi kendala besar. Masih sedikit perusahaan yang bersedia membuka peluang kerja bagi mantan narapidana, sehingga opsi untuk menyalurkan mereka ke dunia kerja sangat terbatas.

Secara keseluruhan, keberhasilan program pemberdayaan ini membutuhkan sinergi antara berbagai pihak. Pokmas Lipas perlu terus meningkatkan kapasitasnya, sementara masyarakat luas harus diajak untuk lebih terbuka dalam menerima mantan narapidana. Selain itu, keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan ini secara kolektif, peluang untuk membantu mantan narapidana membangun kembali kehidupannya akan semakin besar.

Program Pokmas di Bapas Purwokerto menunjukkan dampak positif yang signifikan. Mantan pemeran yang terlibat dalam program ini memiliki peluang lebih besar untuk menjalani hidup produktif, mengurangi kemungkinan residivisme, dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap mereka. Selain itu, Griya Abhipraya sebagai pendukung program menciptakan ruang aman untuk pelatihan dan transisi menuju kemandirian. Namun, keberhasilan program ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lebih luas antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan menghilangkan stigma dan menyediakan dukungan berkelanjutan, program seperti Pokmas dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kualitas masyarakat di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan mantan narapidana melalui peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas) di Bapas Purwokerto sangat penting untuk mendukung reintegrasi sosial mereka. Mantan narapidana sering menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma negatif, kurangnya keterampilan, dan masalah kesehatan mental, yang dapat menghambat proses adaptasi mereka kembali ke masyarakat. Program yang dijalankan oleh Pokmas, seperti pelatihan keterampilan, bimbingan kepribadian, dan penyediaan kesempatan kerja, bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan diri, kemandirian ekonomi, dan hubungan sosial yang sehat bagi mantan narapidana. Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan program-program yang terstruktur, diharapkan mantan narapidana dapat berfungsi secara produktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat, serta mengurangi risiko residivisme. Pemberdayaan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa hormat dan tulus, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto atas segala dukungan dan kerja sama yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para klien Bapas yang telah dengan sukarela meluangkan waktu, berbagi pengalaman, serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasyarakatan maupun untuk kepentingan praktis dalam meningkatkan sistem dan proses pemasyarakatan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bado, B. (2022). Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. Lexy, J dan Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 4
- Fauzi, A., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). PROGRAM DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA TERORISME DI INDONESIA. *jurnal Bimbingan*, 4, 178–189.
- Moha, I. (2019). Resume Ragam Penelitian Kualitatif.

- Muhammad, L. (2019). BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN.
- Penelitian, B., & Pemasarakatan, B. (2019). *ANALISA KEBUTUHAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) BANDUNG (Analysis On*
- Priyanto, D. (2006). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- SITA AIZA NUR AIDA. (2024). *HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN ADAPTASI PSIKOSOSIAL NARAPIDANA. The Needs Of Counselor In Bandung Correctional Institution) Abstrak. 15, 69–84.*